

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019).

Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara atau bangsa didasarkan pada tiga pendekatan, yaitu pendekatan makro, sektoral dan regional. Pembangunan makro mencakup pembangunan lingkup nasional yang pencapaiannya merupakan hasil dari tingkat sektoral dan regional, sehingga kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional menjadi sangat penting. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan pada prinsip-prinsip otonomi yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk

melakukan pembangunan daerahnya secara mandiri dan independen sesuai karakteristik dan keanekaragaman daerahnya (Bappenas, 2014).

Tujuan program Otonomi Daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, kemudian mengurangi kesenjangan antar daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik daerah. Pada Pasal 1 ayat 5 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar tujuan pembangunan dapat terwujud maka peran serta dan kerja sama dari seluruh masyarakat yang ada sangat diperlukan. Salah satu faktor yang menjadi penentu terlaksananya suatu pembangunan adalah faktor manusia itu sendiri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian yang terpenting dalam pembangunan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang menjadi pemicu pembangunan suatu kawasan. Kesejahteraan penduduk dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi.

Pelaksanaan pembangunan menghararapkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi. Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat ini dilaksanakan agar pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Upaya pemerintah bersama masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa hanya akan berhasil, apabila dilaksanakan dengan suatu pola, sistem dan mekanisme yang tepat.

Mekanisme pembangunan desa adalah suatu proses perpaduan antara dua kelompok utama, yaitu berbagai kegiatan pemerintah dan kegiatan partisipasi masyarakat. Perpaduan antara berbagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan partisipasi masyarakat dalam satu mekanisme yang baik akan mempercepat pembangunan, sehingga dapat berhasil dalam proses pencapaian desa swasembada (Sajogyo dan Sajogyo Pudjiwati, 1992).

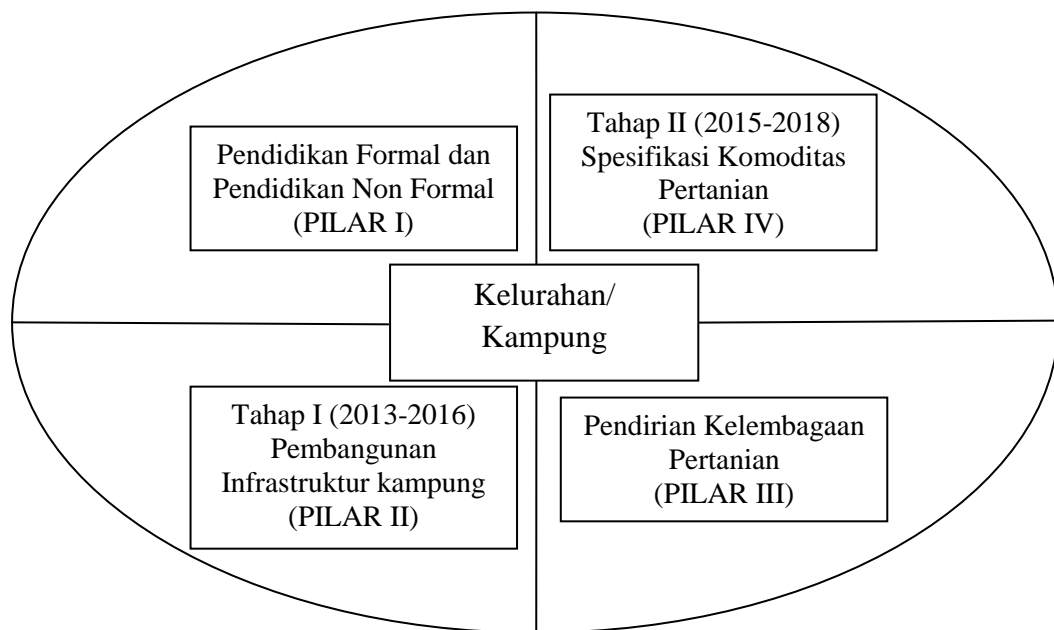
Berdasarkan kebijakan otonomi daerah yang mendukung sepenuhnya perkembangan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengembangkan kebijakan program pembangunan oleh, dari dan untuk masyarakat dengan penggunaan pola *buttom-up* melalui pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan yang dilakukan yaitu Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) yang merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Tulang Bawang dengan memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Tulang Bawang dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada

masyarakat kampung/kelurahan untuk pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan bermanfaat untuk masyarakat.

Tujuan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang yaitu, meningkatkan partisipasi masyarakat kampung/kelurahan dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan, meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan, meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di kampung/kelurahan, serta menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

Program pembangunan dilaksanakan berdasarkan beberapa strategi diantaranya, mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lokal sehingga mampu menyerap tenaga kerja agribisnis kreatif, menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) ke depan dan kebelakang yang besar melalui “*input-output-outcome*” antar industri, konsumsi dan investasi melalui keunggulan komparatif yang dimiliki desa agar menjadi keunggulan kompetitif kecamatan, dan mengembangkan keunggulan yang dimiliki untuk mampu bersaing meningkatkan nilai tambah dan berdaya guna bagi masyarakat di pedesaan.

Program GSMK kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan melalui dua tahap sesuai dengan 4 Pilar Model Lingkaran Ekonomi Kampung yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. 4 Pilar Model Lingkaran Ekonomi Kampung

Pada Gambar 1. dapat dilihat bahwa berdasarkan 4 pilar model lingkaran ekonomi kampung, program pembangunan dilaksanakan secara bertahap. Tahap I dilakukan selama periode 2013-2016 dengan lebih menekankan pada pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta pengembangan infrastruktur kampung. Pada Tahap II periode 2015-2018 pembangunan berbasis agribisnis dari kampung mulai dilakukan mulai dari pendirian kelembagaan pertanian hingga spesifikasi komoditas pertanian yang akan menjadi komoditas unggulan di setiap kampung.

Pada Tahap I sarana prasarana diajukan oleh masyarakat sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada di tingkat kampung masing-masing adalah irigasi, jalan dan jembatan. Pembangunan irigasi bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pasokan air dan efisiensi pemanfaatan air bagi pertanian tanaman pangan. Pembangunan jalan dan jembatan bertujuan untuk memperlancar hubungan antar kampung dan juga memperlancar arus transportasi masyarakat.

Metode pelaksanaan yang dilakukan pada program GSMK yaitu dengan pemberian dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di setiap kampung. Bupati merupakan penanggungjawab Program GSMK di tingkat kabupaten dan camat merupakan penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan Program GSMK ditingkat kecamatan. Pelaksana Program GSMK di tingkat kampung yaitu Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana program yang secara langsung lebih dekat dengan masyarakat memiliki tugas yaitu :

(1) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis administratif dalam pelaksanaan kegiatan, (2) Menyusun proposal kegiatan yang akan dilaksanakan dengan di fasilitasi Astek (Asisten Teknik) dan KMP (Konsultan Manajemen Pendamping), (3) Menyiapkan dokumen administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, (4)

Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan, (5) Membuat atau membuka rekening Pokmas untuk pencairan dana BLM, (6) Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana yang direncanakan bersama masyarakat, (7) Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, (8) Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya, (9) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat secara periodik, (10) Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan tingkat kampung/kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi (Seksi Pelaksana, Seksi Monitoring dan Evaluasi serta Seksi Pemeliharaan) sedangkan anggota pokmas disesuaikan masyarakat tiap kampung.

Salah satu faktor yang dapat memperlancar pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat tersebut, Pokmas berintegrasi, bekerjasama dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Pada hakekatnya, tujuan kelompok mampu mengikat seluruh anggota dalam kelompok untuk menjadi satu kesatuan kelompok yang dinamis, karena semangat anggota tidak selalu berada dalam keadaan statis, akan tetapi selalu berubah-ubah secara terus menerus dalam menjalankan kehidupan berkelompok. Semangat anggota tercermin dalam setiap tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok.

Tujuan dinamika kelompok adalah tercapainya tujuan kelompok dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh anggota kelompok. Adanya dinamika kelompok tersebut mampu memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada setiap anggota kelompok untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, sehingga melalui kerjasama dan partisipasi anggota inilah

tujuan program GSMK dapat berhasil dan berjalan dengan baik. Partisipasi anggota di dalam kegiatan kelompok merupakan usaha aktif yang terbagi menjadi tiga kategori partisipasi yaitu partisipasi anggota dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Adanya dinamika kelompok tersebut, mampu mempengaruhi tingkat partisipasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan kelompok.

Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 kecamatan. Kecamatan Penawar Tama merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai jumlah desa terbanyak, dengan jumlah 14 desa. Akan tetapi, penduduk di kecamatan tersebut bukan merupakan jumlah yang terbanyak di Kabupaten Tulang Bawang. Dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah kampung per Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang menurut Kecamatan 2013

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jumlah Kampung / Kelurahan
1	Banjar Agung	35.732	11
2	Banjar Margo	37.012	12
3	Gedung Aji	13.162	10
4	Penawar Aji	17.173	9
5	Meraksa Aji	13.061	8
6	Menggala	41.554	9
<b>7</b>	<b>Penawar Tama</b>	<b>26.071</b>	<b>14</b>
8	Rawajitu Selatan	31.099	9
9	Gedung Meneng	37.429	11
10	Rawajitu Timur	29.166	8
11	Rawa Pitu	16.067	9
12	Gedung Aji Baru	20.956	9
13	Dente Teladas	59.706	12
14	Banjar Baru	12.087	10
15	Menggala Baru	11.951	10
	<b>Jumlah</b>	<b>402.226</b>	<b>151</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013



Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa Kecamatan Penawar Tama merupakan kecamatan yang memiliki desa terbanyak dengan jumlah 14 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Dente Teladas dengan jumlah sebanyak 59.706 jiwa. Berdasarkan kebijakan Bupati Tulang Bawang bahwasannya BLM GSMK disalurkan pada setiap desa di Kabupaten Tulang Bawang masing masing sebesar Rp 200.000.000,00, maka Kecamatan Penawar Tama menjadi kecamatan yang paling banyak menerima BLM GSMK dari pemerintah kabupaten Tulang Bawang dan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) GSMK Kabupaten Tulang Bawang menurut Kecamatan 2013

No	Kecamatan	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Jumlah BLM (Rp)
1	Banjar Agung	11	2.200.000.000
2	Banjar Margo	12	2.400.000.000
3	Gedung Aji	10	2.000.000.000
4	Penawar Aji	9	1.800.000.000
5	Meraksa Aji	8	1.600.000.000
6	Menggala	9	1.800.000.000
<b>7</b>	<b>Penawar Tama</b>	<b>14</b>	<b>2.800.000.000</b>
8	Rawajitu Selatan	9	1.800.000.000
9	Gedung Meneng	11	2.200.000.000
10	Rawajitu Timur	8	1.600.000.000
11	Rawa Pitu	9	1.800.000.000
12	Gedung Aji Baru	9	1.800.000.000
13	Dente Teladas	12	2.400.000.000
14	Banjar Baru	10	2.000.000.000
15	Menggala Baru	10	2.000.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>151</b>	<b>30.000.000.000</b>

Sumber : Konsultan Manajemen Pendamping LPM UNILA Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013.

Tabel 2. menunjukkan bahwa Kecamatan Penawar Tama merupakan kecamatan yang paling besar menerima BLM GSMK di Kabupaten Tulang Bawang dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 2.800.000.000,00. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah untuk memberikan dana bantuan masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 pada setiap kampung/kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang guna melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai tujuan program GSMK pada tahap I, sehingga perlu dikaji adanya hubungan dinamika Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sejauh mana tingkat dinamika Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang ?
2. Sejauh mana tingkat partisipasi dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang ?
3. Sejauh mana hubungan dinamika Kelompok Masyarakat (Pokmas) terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat dinamika Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang.
2. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang .
3. Menganalisis hubungan dinamika Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Kelompok masyarakat, dapat memberikan pengetahuan mengenai dinamika kelompok dan manfaatnya bagi keberlangsungan kelompok.
2. Pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
3. Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.